

KEBANGKITAN POLITIK LOKAL KAWASAN PERBATASAN INDONESIA (KALIMANTAN BARAT) - MALAYSIA (SARAWAK) PERSPEKTIF KONFLIK VERTIKAL DAN HORIZONTAL

Rizal A.Hidayat

Departemen Pengembangan Program Kelas Executive Universitas Esa Unggul

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510

andrial_rizal@yahoo.com

Abstrak

Fenomena WNI yang menjadi warga negara Malaysia menyangkut konflik antar etnis dan ilegalitas kegiatan ekonomi perbatasan RI-Malaysia (Serawak) di Provinsi Kalimantan Barat menarik untuk dikaji dalam perspektif konflik horizontal maupun vertikal. Keduanya merupakan isu-isu strategis lokal pasca dibukanya pintu kebijakan otonomi daerah di provinsi Kalimantan Barat. Kedua isu strategis ini pada akhirnya membawa pengaruh demokratisasi otonomi daerah di Kalimantan Barat yang menyangkut dinamika ketahanan politik lokal kawasan perbatasan yang mewakili perbatasan RI – Malaysia itu sendiri. Dalam konteks proses demokratisasi yang berjalan dalam kerangka otonomi daerah, maka kebijakan penempatan elit politik berbasis identifikasi etnis diharapkan mampu mengelola keberagaman tuntutan dan kepentingan etnis-etnis yang berbeda-beda di setiap kabupaten, sehingga pada akhirnya tetap inheren terhadap kebutuhan ekonomi-politik lokal kawasan perbatasan tersebut. Komprehensifitas deskripsi tulisan ini berfokus pada kebijakan identifikasi elite politik etnis yang berlatar belakang konflik horizontal (komunal) dan vertikal antar etnis kawasan perbatasan Indonesia (Kalimantan Barat) dengan Malaysia (Serawak).

Kata Kunci : Politik Etnis, Identitas Etnis, Konflik Horizontal

Pendahuluan

Dinamika fenomena politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia pasca perubahan kebijakan politik ekonomi pembangunan yang bercorak sentralistis menjadi desentralisme kekuasaan memberikan dampak positif bagi perkembangan otonomi pembangunan daerah. Namun di sisi lain, pada momen yang sama muncul beberapa substansi permasalahan dengan berbagai macam *stereotype* karakteristiknya tersendiri. Jika pada masa orde baru mayoritas substansi permasalahan dengan karakteristiknya lebih mencerminkan problem *mismanagement* kebijakan elit politik pusat terhadap pembangunan provinsi, maka pada era otonomi daerah sebagai eksistensi tuntutan desentralisasi kekuasaan, substansi dan karakter permasalahannya mencerminkan dinamika konflik internal daerah yang memili-

ki eskalasi *stereotype* konfliknya sendiri-sendiri. Tergantung dari bagaimana *stereotype* permasalahan tersebut dibangun oleh elemen-elemen lokal sebagai domain pencipta permasalahan pengelolaan keseimbangan distribusi kepentingan dan wewenang pembangunan antara pusat dan daerah.

Sesudah bergulirnya reformasi sejak tahun 1998, dinamika politik di daerah memasuki era baru pula. Aktor, institusi dan budaya lokal bermunculan kembali dan mulai memainkan peran di dalam politik lokal. Aktor-aktor lokal yang teorganisir dan memiliki simbol *cultural* lokal kembali berada di panggung politik. Pertanyaannya adalah bagaimana pola dinamika politik lokal? Apakah ada pola tertentu yang nampak muncul dari berbagai daerah? Bagaimana efek dinamika politik

daerah terhadap kon-solidasi demokrasi di tingkat daerah? Aktor seperti apa yang cenderung menguasai politik lokal? Institusi macam apa yang menjadi kendaraan politik elit lokal? Apakah ada polarisasi, friksi atau konflik yang merupakan fungsi dari struktur tradisi dan kultur lokal? Apakah jaringan politik berbasis cultural bisa membentuk aliansi politik dominan di tingkat lokal? (Baswedan, 2007).

Beberapa varian isu-isu lokal strategis tersebut dikemas dalam fokus permasalahan yang mengindikasikan dinamika eksistensi politik lokal, yang dapat digali dari sejauh mana resistensi konflik internal dikelola dari sumbernya, yaitu melalui interdependensi peran aktor, institusi maupun budaya lokal tersebut. Ketiganya adalah elemen inti pembentuk politik lokal yang saling berinteraksi dalam mempengaruhi ketahanan ekonomi-politik lokal pada akhirnya.

Baik dinamika ketahanan politik lokal merupakan akses yang berjalan sedemikian rupa tanpa disadari. Hal ini didasarkan pada beberapa mainstream pemikiran :

1. Perubahan sosial dalam konteks keberagaman etnis dalam wilayah yang terdesentralisasi merupakan perubahan sosial yang diterjemahkan sebagai akibat-akibat revolusioner efek dinamika hubungan pusat-daerah dan antar daerah secara politik dan ekonomi. *Corak desentralistik memunculkan peran pemerintah daerah yang semakin besar dalam menjalankan roda pemerintahan ketimbang pada periode sebelumnya.* (Haryanto, 2006).
2. Dengan diterapkannya penyelenggaraan yang lebih otonom, dan pada saat yang bersamaan bergulir arus demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka peluang masyarakat untuk lebih leluasa meyalurkan aspirasinya semakin besar. Berikutnya, demokratisasi yang menggelinging dalam kehidup-

an masyarakat tadi juga memungkinkan munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan berbeda-beda di masyarakat. Masing-masing kelompok masyarakat yang bebas dan leluasa menyalurkan aspirasi tuntutannya tersebut sangat dimungkinkan saling berebut untuk memperoleh prioritas agar segera direspon oleh pemerintah setempat. Kondisi ini menyebabkan semakin besarnya kemungkinan bagi munculnya benturan antar kelompok satu dengan lainnya. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi membuka kemungkinan bagi munculnya konflik horizontal ke permukaan. Selain konflik horizontal, perubahan yang ada juga memungkinkan terjadinya konflik vertikal, yakni benturan antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dengan pihak pemerintah (pusat maupun daerah). Dengan adanya ruang yang cukup longgar bagi masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi dan menuntut hak-hak yang dimiliki, maka kelompok masyarakat yang tidak terpenuhi tuntutan aspirasinya dapat melakukan tindakan perlawanan terhadap pemerintah sebagai bentuk ekspresi kekecewaannya (Ibid, 2006).

Pembahasan

Politik Identitas Garis Etnis

Dibandingkan dengan 32 provinsi lainnya, provinsi Kalimantan Barat memiliki keunikan tersendiri dalam kajian penerusan ini yang didasarkan pada alasan utama bahwa secara perbatasan darat, dibandingkan dengan provinsi lainnya, maka wilayah Kalimantan Barat selain berbatasan langsung dengan perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia Timur (negara bagian Sarawak), maka provinsi ini memiliki keragaman etnis penduduk asli dengan orientasi budaya terhadap

leluhur yang masih tertanam kuat dalam setiap kelompok masyarakat masing-masing etnis. Yang secara laten maupun terbuka memiliki potensi konflik horizontal, bahkan vertikal jika tidak dikelola prioritas keberagaman kebutuhan dan tuntutan politik maupun ekonominya, baik secara kelembagaan struktural maupun non formal/symbolis.

Dalam konteks kelembagaan struktural di Kalimantan Barat sebenarnya sudah menganut satu bentuk konsesi politik antar etnis dominan yang menganut paham politik identitas etnis. Berlainan dengan *image* kekerasan yang tercipta dari konflik tahun 1997 dan 1999, politik etnis di Kalimantan Barat telah menjadi hal yang normal, dan umumnya bersifat damai. Kompromi-kompromi etnis yang berhasil dicapai dimaksudkan untuk meredam terulangnya konflik kekerasan. Perkembangan politik etnis ini menemukan momentum aktualisasinya semenjak berakhirnya Orde Baru dengan pemekaran di beberapa kabupaten yang mayoritas berpenduduk Dayak dan Melayu. Dua kabupaten baru, Bengkayang dan Landak, dipisahkan dari Kabupaten Sambas dan Pontianak. Etnisitas merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses pemekaran itu, walaupun asumsi ini ditolak oleh pemerintah. Landak dan Bengkayang adalah jelas Kabupatennya etnis Dayak. Kabupaten Landak memiliki populasi Dayak mencapai 79%, sementara orang-orang Melayu hanya mencapai 9,7%. Populasi Dayak di Kabupaten Bengkayang adalah 52,4%, sementara populasi Melayu 18,7%.

Setelah pemekaran ini, kabupaten-kabupaten induk mereka, Sambas dan Pontianak, menjadi kabupaten Melayu. Pemerintah menentukan batas wilayah kabupaten baru dengan mengikuti garis-garis etnis. Kecamatan - kecamatan dengan mayoritas penduduk Dayak, yaitu Mandar, Menjalin dan Mempawah Hulu, yang aslinya direncanakan berada dalam Kabupaten Pontianak, kini dialihkan ke Kabupaten Landak. Pemerintah juga mempercepat pemekaran

di daerah-daerah rawan konflik. Bengkayang, misalnya ditetapkan lebih awal daripada Singkawang yang sebenarnya lebih siap namun keadaannya tenang. Pembentukan Kabupaten Kubu (keluar dari Kabupaten Pontianak), yang diusulkan bersama-sama dengan Kabupaten Landak, tetapi belum pernah mengalami konflik, tetap tertunda (baru terealisasi pada tahun 2008 menjadi kabupaten Kubu Raya – pen -). Pemekaran kabupaten dalam kasus-kasus ini berkaitan dengan *power sharing* dan pemberian akses ke birokrasi. Pemerintah mempercepat pembentukan kabupaten Dayak agar orang Dayak bisa memiliki daerah, tempat mereka bisa memerintah. Salah satu tujuannya untuk mencegah terulangnya konflik pada tahun 1997 dan 1999. Sejauh ini kebijakan terbukti ini berhasil. Landak dan Bengkayang yang dulu menjadi daerah rawan konflik etnis kini sudah menjadi tenang (Tanasaldy, 2007). Terdapat tiga kaidah korelasi penting dengan pembentukan daerah-daerah berdasarkan garis etnisitas ini :

Pertama, pemerintah pusat/provinsi bisa mengakomodir distribusi aspirasi dan kepentingan politik antar dua etnis, yaitu Dayak dan Melayu yang cenderung saling berkompetisi dalam ranah politik kelembagaan formal struktural. **Kedua**, pemerintah pusat/provinsi Kalimantan Barat bisa mengkonsesikan secara global dalam konteks otonomi daerah pada peningkatan distribusi kebijakan pembangunan ekonomi etnisitas di luar etnis Dayak dan Melayu. Di luar kedua etnis tersebut yang dimaksud adalah etnis Cina, Bugis, Jawa, Madura dan sebagainya kawasan perbatasan negara. **Ketiga**, ekses yang ditimbulkan dari dua implikasi ini adalah penguatan ketahanan wilayah yang terdesentralisir secara garis etnis pada mobilisasi pengolahan sumber-sumber aset ekonomi lokal yang identik terhadap *needs and wants* penduduk setempat yang meminimalisir segala dampak ilegal akibat disparitas

Tabel 1
Komposisi Garis Etnis Bupati dan Wakil Bupati
berdasarkan Kabupaten-kabupaten Di Kalimantan Barat

Etnis Asal	Kabupaten/Kota	
Bupati/Walikota	Wakil Bupati/Wakil Walikota	
H.Burhanudin (<i>melayu</i>)	dr.Hj. Juliarti (<i>melayu</i>)	<i>Sambas*</i>
Suryatman Gidot,SPd (<i>dayak</i>)	Agustinus Naon,Ssos (<i>dayak</i>)	<i>Bengkayang*</i>
Adrianus.A Sidot (<i>dayak</i>)	Agustinus Sukeman (<i>dayak</i>)	<i>Landak*</i>
H.Ria Norsan (<i>melayu</i>)	Rubianto (<i>jawa</i>)	Pontianak
H.Setiman (<i>melayu</i>)	Paulus Hadi (<i>dayak</i>)	<i>Sanggau*</i>
Drs.Henrykus,Msi (<i>dayak</i>)	Boyman Harun,SH (<i>melayu</i>)	Ketapang
Milton Crosby (<i>dayak</i>)	Drs.Ignatius Juan,MM (<i>dayak</i>)	<i>Sintang*</i>
A.M.Nasir,SH (<i>melayu</i>)	Agus Mulyana,SH (<i>melayu</i>)	<i>Kapuas Hulu*</i>
Simon Petrus,Ssos,Msi (<i>dayak</i>)	Rupinus,Ssos,Msi (<i>dayak</i>)	Sekadau
H.Firman Muntaco (<i>melayu</i>)	Panji,S.sos (<i>dayak</i>)	Melawi
H.Sutarmizi,SH (<i>melayu</i>)	Paryadi,S.Hut (<i>madura</i>)	Kota Pontianak
Hasan Karman (<i>Cina</i>)	Edy Yakob (<i>melayu</i>)	Kota Singkawang
Muda Mahendrawan,SH (<i>melayu</i>)	Andreas Muroten (<i>dayak</i>)	Kubu Raya
H.Hildi Hamid (<i>melayu</i>)	Said (<i>melayu</i>)	Kayong Utara

Sumber : - KPUD Kalimantan Barat

- Data Diambil setelah PilBup 2010 oleh masing-masing kabupaten

* Kabupaten-kabupaten perbatasan Kalimantan Barat (RI) – Malaysia (Sarawak)

konfrontasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengembangan otonomi daerah yang bersangkutan.

Tujuan akhir dari kebijakan konsesi ini pada akhirnya memberikan suatu landasan berpijak secara ekonomis bagi semua etnis yang bernaung di setiap kabupaten, khususnya bagi kabupaten-kabupaten yang cenderung mendekati kawasan perbatasan. Dalam hal ini isu dan permasalahan utama yang dihadapi harus menekankan pada strategi pengelolaan yang mencakup kesejahteraan rakyat dan perekonomian wilayah, yang didukung legitimasi politik, hukum dan keamanan yang memadai (Mawardi, 2009).

Di samping memberikan landasan berpijak secara ekonomis, latar Belakang dari penetapan elit politik berdasarkan ga-

ris etnik *region* yang terlembagakan secara formal ini pada hakekatnya merupakan representasi cermin keunikan spesifik Kalimantan Barat. Suatu keunikan spesifik yang ditinjau dari perspektif konflik vertikal dan horizontal sebagai pondasi utama pembentukan kabupaten-kabupaten berdasarkan garis etnis tersebut, terutama di sepanjang kawasan perbatasan.

Konflik Vertikal dan Horizontal

Menjustifikasikan fenomena deskripsi di atas dalam ranah jenis dan karakter konflik di Kalimantan Barat, ketika tulisan ini dibuat, dalam jangka waktu seminggu terjadi dua peristiwa fenomenal kontemporer di provinsi Kalimantan Barat. Kedua peristiwa fenomenal kontemporer ini penting untuk mendeskripsikan potret

sampel representasi *stereotype* konflik vertikal dan horisontal di Kalimantan Barat.

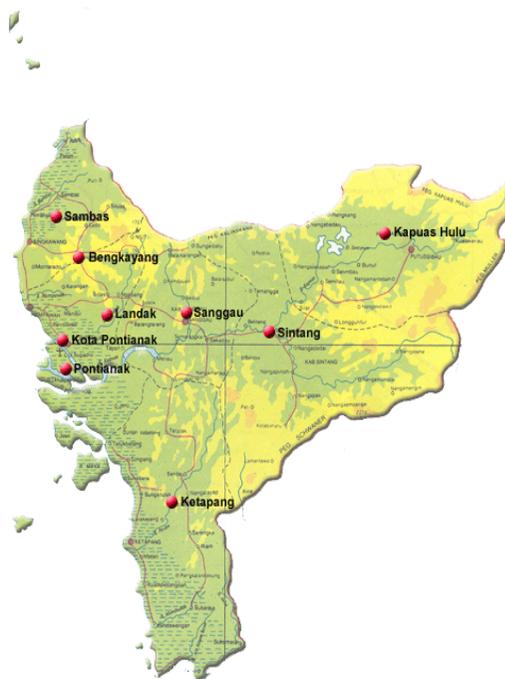
Dengan demikian dapat dipahami juga kekuatan pondasi utama keduanya tersebut dalam melatarbelakangi penetapan kekuasaan kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat berdasarkan garis etnis yang ada.

1. *Konflik Vertikal*. Melalui pemberitaan dari artikel harian Kompas berjudul “2000 WNI jadi warga negara Malaysia” (terkait infrastruktur jalan dan fasilitas umum, yang terjadi semenjak tahun 1997 (Kompas : hal-24, 3 Juni 2010).
2. *Konflik Horizontal*. Pada tanggal yang sama, atau setidaknya semenjak 1 Juni sampai dengan situasi dan kondisi keamanan kota Singkawang benar-benar kondusif aman (Insiden Tugu Naga) semenjak *statement* walikota Singkawang, tentang latar belakang etnis Melayu di Kalimantan Barat yang memicu konflik komunal non fisik di kota Singkawang dan sekitarnya (Sumber : *Borneo Tribune*, www.borneotribune.com, diakses tanggal 5 Juni 2010)

Momen peristiwa sejumlah penduduk Kalimantan Barat yang menyeberang wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Sarawak) melalui Entikong merupakan satu contoh pencerminan dari kurang maksimalnya pemberdayaan perekonomian daerah, yang menjadi latar belakang migrasi mereka menjadi warga negara Malaysia. Atau jika tidak berpindah kewarganegaraan, biasanya mayoritas penduduk lebih memilih menjalin kontak hubungan dagang (migrasi sirkuler) dengan penduduk Malaysia, karena lebih mendatangkan manfaat yang lebih baik secara materi dari aspek finansial maupun ketersediaan sumber daya ekonominya. Menurut paparan Komandan Lanud Supadio, Yadi Indrayadi terhadap pada anggota Komisi I DPR RI, bahwa banyak pesawat-pesawat asing yang terbang rendah di seputar wilayah perbatasan untuk menghindari pemindaian radar TNI. Paling ban-

yak adalah jenis helikopter yang digunakan para pengusaha untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan (sumber: indoflyer.net, diakses 10 juni 2010).

Hasil aset-aset sumber daya ekonomi tersebut memiliki kecenderungan kuat diperdagangkan secara illegal lewat jalur perbatasan darat Kalimantan Barat – Sarawak yang didroping dengan fasilitas pesawat udara/helikopter oleh oknum-oknum pengusaha lokal yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya hal ini berakibat dari ketidakmerataan distribusi salura-



saluran ekonomi antar kabupaten/kota ditunjang dengan pengolahan infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang belum diharapkan sebagaimana mestinya, juga menjadi kendala spesifik yang mempengaruhi ketahanan ekonomi provinsi tersebut.

Pada gilirannya ketika kontrol dan pengawasan fungsi kelembagaan di kabupaten yang bersangkutan atau pemprov menjadi kurang terkontrol terhadap aset-aset sumber daya ekonomi

kabupaten/kota, maka besar kemungkinan muncul konflik vertikal akibat disparitas faktor-faktor eko-nomi yang menyangkut pendapatan dan kesempatan kerja. Akibat *problem matters* konflik vertikal terbuka ini kemudian me-munculkan berbagai kasus tentang migrasi sirkuler maupun migrasi keluar provinsi (menjadi warga negara Malaysia). Contoh-contoh migrasi sirkuler dan keluar provinsi masih bisa dikaitkan pada berbagai perma-salahan yang menyangkut kasus perdag-a-ngan manusia (*human trafficking*) dan nar-kotika yang rentan untuk dilakukan melalui wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perbatasan negara. Dari kasus *human traf-ficking*, kurang lebih sekitar 80,89% koban berasal dari Kalimantan Barat (hasil studi IOM - International Organization for Migration, data diambil dalam kurun waktu Juni 2005 hingga Oktober 2006), dan sisa-nya 19,10 persen berasal dari luar provinsi. Modus operandi yang terkait dengan *human trafficking* biasanya berkisar tentang kasus penipuan, pemalsuan surat, perkosaan, me-mpekerjakan anak di bawah umur, dan ko-mersialisasi perempuan untuk industri seks. Dari studi tersebut maka diketahui ada sem-bilan daerah rawan perdagangan manusia di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sam-bas, Sanggau, Bengkayang, Landak, Kapu-as Hulu, Kota Pontianak, dan Kota Sing-kawang (sumber: Aziz YP, :www.teladan-anakkalimantan.blogspot.com, diakses 10-Juni 2010).

Melihat dari sejumlah kabupaten / kota di Kalimantan Barat seperti tersebut di atas, maka khusus untuk kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang , Putussibau (Kapuas Hulu) adalah yang paling rawan, karena kelima wilayah tersebut merupakan jalur utama darat menuju perbatasan, yang juga adalah empat kabupaten di Kaliman-tan Barat yang letaknya relatif dekat dengan dengan perbatasan darat Indonesia – Malay-sia (Serawak). Pemanfaatan jalur transaksi dan peredaran melalui ketiga kabupaten ini

tidak hanya pada masalah perdagangan manusia, namun juga mengarah kepada jalur peredaran narkoba internasional. Da-erah Sanggau sangat rawan dijadikan se-bagai kawasan peredaran narkotika. Selain berbatasan langsung dengan negara teta-angga Malaysia, luas wilayah Sanggau mencapai 12.818 meter persegi menjadi indikatornya (sumber :Tribun Pontianak, www.tribunpontianak.co.id,diakses 10 Juni 2010). Dari berbagai macam peris-tiwa yang terkait dengan aktifitas per-ekonomian dan perdagangan ilegal ter-sebut di atas dan fenomena 2000 WNI yg menjadi warga negara Malaysia ini mere-presentasikan ketidakpuasan aspirasi dan kepentingan penduduk terhadap pemkab atau provinsi dimana menjadi sumber dari konflik *soft* vertikal. Kesenjangan kesejah-tereraan ekonomi penduduk dari apa yang diharapkan dibandingkan dengan kenyaa-taan yang ada menjadi pemicu terjadinya konflik *soft vertikal*. Pada gilirannya keti-ka resolusi konflik menemui jalan buntu, maka menjadi suatu konflik terbuka (*hard conflict*) vertikal antara pemkab dan prov-insi menuju pada konflik terbuka dengan pempus berbasis dimensi ekonomi, sosial-politik,dan budaya. Keragaman etnis di provinsi Kalimantan Barat yang terre-prentasikan dari tiga etnis mayoritas pen-duduk asli Kalimantan Barat yang terdiri dari etnis Dayak, Melayu dan Cina, di-mana tereksplotasikan salah satunya pada permasalahan konflik vertikal terbuka an-tara etnis Melayu dan Cina, berupa bentu-ran interpretasi sejarah terbentuknya etnis Melayu. Masyarakat Kalimantan Barat ra-ta-rata memiliki karakter budaya kuat da-lam memegang adat leluhur, maka hal ini memberikan satu pemahaman utuh bahwa provinsi tersebut memiliki karak-teristik tersendiri dalam kon-teks dinamika hubu-ngan antar etnis, ekonomi dan sosial bud-aya yang meng-arah pada kondusifitas fe-nomena ekono-mi-politik pembangunan di provinsi tersebut. Masalah insiden Tugu

Naga Di kota Singkawang, dilatarbelakangi oleh interpretasi sejarah tentang terbentuknya Etnis Melayu, dimana merupakan simbol pencerminan konflik horizontal berupa benturan orientasi budaya antara etnis melayu dan Cina yang masih belum tersintesakan. Artinya insiden tersebut mengimplisitkan suatu sikap dan penilaian antara etnis satu dengan yang lain terhadap sejarah komunitas masing-masing yang mewakili etnosentrisme pola pikir, tindak dan perilaku sebagai sinergi inti produk budaya. Pada gilirannya, insiden tersebut sebenarnya adalah mewakili suatu konflik orientasi yang belum menemukan sintesa kesepakatan tentang media kesatuan identitas pembangunan bersama berupa seperti apa, dalam bentuk simbol atau komunikasi bentuk lain, yang nantinya akan mengintegrasikan persepsi dan kepentingan pembangunan kedua belah pihak. Naga merupakan media simbol identitas etnis tionghoa di segala penjuru dunia. Dapat ditafsirkan sebagai suatu *sphere of ethnic's power influence* yang men-generalisir kekuatan keberadaan etnis tionghoa di Kalimantan Barat melalui kota Singkawang.

Populasi penduduk Kalimantan Barat pada umumnya dikomposisikan tidak hanya terdiri dari etnis dayak, melayu dan Cina saja, namun juga terdiri atas etnis-etnis lain dengan jumlah yang cukup signifikan, seperti Bugis, jawa dan Madura. Disamping insiden tugu naga di Singkawang tersebut, sebenarnya secara historis berbagai contoh konflik komunal yang berujung pada terjadinya konflik horizontal terbuka berkarakter *hard conflict* antar etnis di Kalimantan Barat dapat diinventarisir sebagai berikut: (*Sumber: lbhmabmkb.blogspot.com, diakses 6 Juni 2010*) :

- a. Tahun 1950: Untuk pertama kalinya perkelahian massal antara pendatang Madura dan etnis Dayak pecah. Pertikaian ini melahirkan korban dalam jumlah besar, tak diketahui persis penyebabnya.
- b. Tahun 1967: Perkelahian massal dan pengusiran terhadap orang Cina dilakukakan warga Dayak. Sekitar 50 ribu orang Cina mengungsi ke Serawak. Konflik ini lebih disebabkan faktor politik, bukan konflik antar-etnis. Orang Cina dituduh pemerintah Indonesia menjadi kaki tangan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara yang dicap komunis.
- c. Tahun 1968: Terjadi saling bunuh antara orang Madura dan Dayak. Penyebabnya, seorang Camat Sungaipinyuh, Kabupaten Pontianak, bernama Sani, dibunuh seorang petani Madura. Petani itu kecewa lantaran Sang Camat menolak melayani urusan pembuatan surat jual beli tanahnya. Si petani yang tak bisa menerima alasan yang dikemukakan, langsung menikam Sani hingga tewas.
- d. Tahun 1976: Kerusuhan besar antara Madura-Dayak pecah untuk kedua kalinya di Sungaipinyuh. Kerusuhan ini dipicu pembunuhan Cangkeh, seorang petani Dayak, yang dilakukan beberapa orang Madura yang marah karena seorang pendatang Madura dihardik Cangkeh hanya gara-gara menyabit rumput di rumahnya.
- e. Tahun 1977: Bentrokan kembali pecah. Kali ini di Singkawang, Kabupaten Sambas. Robert Lonjeng, seorang polisi dari suku Dayak dibantai seorang pemuda Madura. Si pemuda rupanya gelap mata setelah perang mulut dengan Robert, yang menegur si pemuda, marah karena sang adik perempuannya diajak pergi sampai larut malam. Robert tewas seketika oleh sabetan celurit si pemuda Madura yang memacari adiknya.
- f. Tahun 1979: Dua tahun berikutnya, di Salamantan, masih termasuk Kabupaten Sambas, Sidik, seorang petani Dayak tewas disabet celurit Asmadin asal Madura. Asmadin marah ketika

- dilarang menyabit rumput di rumah milik Sidik. Perkelahian massal, saling membunuh pun terjadi. Sebanyak 21 orang tewas dan 65 rumah musnah terbakar. Untunglah, perang ini tak bertambah besar. Sebab, bala bantuan dari Madura yang kabarnya terdiri dari dua kapal penuh lelaki, sempat disusul dan diminta balik ke darat oleh Bupati Madura ketika itu. Untuk mencegah peristiwa terulang, didirikanlah Tugu Perdamaian Salamantan setelah upacara perdamaian dilakukan.
- g. Tahun 1983: Di Sungaienu, Ambawang, Pontianak, meledak perkelahian antar-etnis Madura dan Dayak. Pemicunya, terbunuhnya Djaelani, seorang petani Dayak oleh petani Madura gara-gara konflik tanah.
 - h. Tahun 1993: Perkelahian antar pemuda di Pontianak mengakibatkan sejumlah korban jiwa. Kerugian juga jatuh akibat dibakarnya Gereja Maria Ratu Pecinta Damai dan Sekolah Kristen Abdi Agape oleh sekelompok karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang Dayak.
 - i. Tahun 1996-1997: Perkelahian kedelapan meledak di Sanggauledo, Sambas. Aksi anti-Madura ini berawal dari sebuah perkelahian antar pemuda kedua suku pada sebuah pertunjukkan dangdut di Ledo, 20 kilometer dari Sanggauledo. Sekelompok pemuda Madura menggoda pemudi-pemudi. Bakrie, anak pasangan Dayak dan Madura, tersinggung dan mencelurit Yokundus dan Takim, pemuda Dayak, sehingga masuk rumah sakit. Teman-teman Yokundus pun mengamuk dan menyerang daerah transmigrasi sosial Lembang dan Marabu. Penghuni daerah transmigrasi tersebut telanjur kabur. Maka, pemuda-pemuda yang marah itu pun membakar rumah-rumah yang dikosongkan.
 - j. Babak kedua kerusuhan terjadi ketika sekelompok orang bertopeng mem bakar kantor dan Koperasi Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih yang dimiliki suku Dayak. Saling bunuh pun terjadi setelah Sartinus Nyangkot, Kepala Desa Maribas, Tebas, tewas dibantai sekelompok pemuda Madura yang menghadangnya sekembali mengikuti upacara wisuda anaknya, Maria Ulfa, di Pontianak. Tercatat, peristiwa ini menewaskan hampir 200 orang.
 - k. Tahun 1999: Pertikaian antara Madura, Melayu, Bugis, yang kemudian juga melibatkan Dayak, pecah di Sambas, Kalimantan Barat. Sebanyak 265 orang telah tewas (252 Madura, 12 Melayu, seorang Dayak), 38 luka berat, sembilan luka ringan. Harta yang musnah: lebih dari 2.330 rumah hangus terbakar dan 164 di-rusak massa, empat mobil dibakar dan enam dirusak, sembilan sepeda motor dibakar dan satu dirusak. Kasus ini dimulai dari pembalasan kasus penyerangan ratusan orang Madura dari Desa Rambaian dan sekitarnya ke Desa Paritsetia, Kecamatan Jawai. Insiden ini menewaskan tiga orang dan tiga lainnya luka-luka berat di pihak suku Melayu. Anehnya, yang ditahan aparat keamanan justru seorang suku Melayu, bukan warga penyerang. Sebelumnya ada kasus pula, Rudi, pemuda asal Madura, menyerang Bujang Labik yang Melayu, dengan celurit. Awal kejadian, Rudi tersinggung karena merasa dipelototi kernet angkutan kota itu lantaran tak membayar ongkos. Setelah itu, konflik pun meletus antara etnik Madura dan Dayak.
 - l. Muncul pula kasus baru. Ibrahim, seorang pemuda Madura, menenteng senjata api rakitan di Pasar Pemangkat dianggap petentengan, ia ditegur oleh beberapa orang. Ibrahim tak senang dan terjadilah cek-cok. Setelah itu,

Ibrahim pulang ke rumah. Entah siapa pelakunya, tiba-tiba ditemukan empat warga Madura tewas, tiga di Desa Perapakan dan seorang di Desa Sinam. Keterlibatan orang Dayak dalam konflik etnis ini dipicu terbunuhnya Mar-tinus Amat, pekerja perkebunan kelapa sawit asal Salamantan oleh seorang pemuda. Mobil yang ditumpanginya pun dibakar.

- m. Masih ada cerita lagi, etnis Bugis juga terlibat. Ceritanya berawal dari perang mulut antara pemuda Madura dan Bugis, karena etnis Madura ingin menonton gratis road race di terminal induk Sing-kawang. Ia mengancam hendak menyerang Kualasingkawang. Maka, etnis Bugis pun ikut angkat parang.

Potensi Konflik etnis di Kalimantan khususnya di Kalimantan Barat merupakan suatu *continous conflict siklus* yang memiliki motif gerakan *Mellenarian conflict* dalam pandangan Al-Qadrie (www.bor-neotribune.com, diakses 10 Juni 2010). Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, juga megandung potensi konflik yang sangat besar. Dari perspektif budaya, besarnya potensi konflik ini dapat dilihat akar penyebabnya antara lain secara historis dari gerakan sosial yang sudah hidup ribuan tahun (*millenarian social movement*). Ada dua karakter gerakan sosial ini: (1) keras, beringas dan tidak jelas arah dan sasarannya, dan (2) tidak terlalu keras dan tidak beringas serta jelas sasarannya. Berdasarkan karakter di atas, paling tidak ada tiga jenis gerakan sosial dilihat dari karakter tersebut: (1) *Adat Bungan* di Kalimantan Selatan (Kalsel), (2) *Nyuli* di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Kedua gerakan *millenarium* ini tidak terlalu keras dan bringas, dan mereka memiliki sasaran yang jelas yaitu aparat kolonialisme Belanda dan misionaris serta zending dari Barat khususnya Belanda. (3) Gerakan

Mellenarian yang terjadi di Kalimantan Barat memiliki karakter beringas, keras dan tidak jelas sasarannya, dan saya namakan Tariu atau Mangkok Merah. Setelah kekuasaan *Kolonialisme* dan *Imperialisme* Belanda henggang dan misionaris serta *zending* diganti dengan para petugas dari putera-putera Indonesia sendiri, kekerasan berkurang pada tiga provinsi yang disebut pertama. Kondisi seperti ini tidak terjadi di Kalimantan Barat. Adalah benar bahwa sasaran gerakan sosial ribuan tahun ini adalah juga menentang kekuasaan kolonialisme Belanda. Setelah kekuasaan asing tidak ada lagi, kekerasan riil tampaknya memang berkurang, namun secara potensial, kekerasan tersembunyi (*latent violent conflict*) tetap masih ada, dan sewaktu-waktu bilamana kondisi sosial sebagai prasyarat timbulnya kekerasan riil terjadi, maka potensi kekerasan yang tersembunyi selama ini akan tampil dalam kenyataan (*real violence*). *Lingkaran kekerasan di Kalimantan Barat dalam setiap 30 tahunan sekali terjadi dalam empat priode yaitu 1900-an, 1930-an, 1960-an, dan 1990-an* (lihat Alqadrie. 2008. *Migration, Transmigration and Violent conflict in Kalimantan*). Ini merupakan fakta historis tak terbantahkan yang membuktikan bahwa potensi kekerasan di provinsi ini sangat besar. Sebagai konsekuensinya, hipotesis kekerasan pada 2020-an sebagai prediksi bahwa kekerasan akan terjadi lagi di Kalimantan Barat pada 30 tahunan mendatang, yaitu pada 2020, bukan tidak boleh jadi akan terbukti dan diterima kebenarannya.

Dengan justifikasi kedua deskripsi argumen tersebut di atas, meskipun berdiri pada frame *permasalahan* masing-masing. Namun keduanya mewakili satu rutinitas permanen konflik antara *rulling-class* (pemerintah) dengan *rulled-class* (masyarakat), dan juga antar *rulled-class* (konflik komunal antar etnis/horizontal). Suatu Konflik yang mencerminkan instabilitas

permanen artikulasi aspirasi dan kepentingan yang belum menemukan sebuah jembatan media identitas yang mewakili entitas kesatuan akomodasi aspirasi dan kepentingan pembangunan kedua belah pihak. Dengan kata lain, kedua kejadian tersebut di atas mengindikasikan suatu permasalahan elementer yang secara evolusioner melahirkan ketidakpastian visi kebijakan pembangunan provinsi. Dan tentunya berdampak pada kerawanan ketahanan wilayah/daerah dalam segala aspek fondasinya di kabupaten-kabupaten sepanjang perbatasan Indonesia–Malaysia Timur. Oleh karena itu dengan pembentukan kabupaten-kabupaten berdasarkan garis etnis melalui di sepanjang perbatasan Indonesia – Malaysia Timur, dapat meminimalisir konflik vertikal maupun horizontal berdasarkan tujuan awal dari pembentukannya.

Kesimpulan

Dinamika fenomena politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia pasca perubahan *mindset* kebijakan politik-ekonomi pembangunan para elit pemerintahan pusat dan provinsi berpindah dari sentralisme kekuasaan, menjadi desentralisme kekuasaan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan daerah (kabupaten/kota). Namun di sisi yang lain, pada moment yang sama muncul beberapa substansi permasalahan dengan berbagai macam *stereotype* karakteristiknya tersendiri. Dalam hal ini salah satunya, *stereotype* karakter konflik berupa konflik vertikal dan horizontal pada suatu kawasan yang memiliki orientasi budaya yang begitu kuat pada setiap kelompok etnis yang multivariat.

Desentralisasi politik dan fiskal (sebagai efek akselerasi UU 22/1999 dan UU 25/1999) mempengaruhi kinerja desentralisasi ekonomi pada masing-masing daerah (kabupaten/kota). Desentralisasi ekonomi yang dimaksudkan adalah upaya pmda untuk kapitalisasi sumber daya yang

dimilikinya, baik yang bersifat *endowment* maupun sumber daya manusia melalui tata kelola kota (ekonomi) dalam ruang lingkup yang menjadi kewenangannya. Dengan diterapkannya penyelenggaraan yang lebih otonom, dan pada saat yang bersamaan bergulir arus demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka peluang masyarakat untuk lebih leluasa meyalurkan aspirasinya semakin besar. Demokratisasi yang menggelinding dalam kehidupan masyarakat tadi memunculkan berbagai kelompok yang mempunyai perbedaan kepentingan di masyarakat. Masing-masing kelompok memiliki kebebasan dalam menyalurkan aspirasi dan tuntutan-nya , yang pada akhirnya mereka saling berebut untuk memperoleh respon prioritas dari pemerintah setempat. Salah satu isu strategis dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan daya saing kompetisi antar provinsi/kabupaten pada keseimbangan integrasi stabilitas politik dan ekonomi nasional adalah etnosentrisme daerah.

Dalam konteks permasalahan ketahanan ekonomi-politik di Kalimantan Barat, maka alternatif kebijakan pembangunan ekonomi-politik yang diterapkan mengacu pada konsesi elit politik berdasarkan garis identitas etnis. Konsesi ini merupakan konsep kebijakan pembangunan wilayah dengan karakter politik dan ekonomi lokal. Pengertiannya adalah memahami persoalan pembangunan daerah masing-masing dilihat dari keberagaman etnis yang memiliki kekuatan dan kelemahan dalam hal mobilisasi segala sumber daya politik dan ekonomi daerah (kabupaten/kota). Tujuan akhirnya adalah meminimalisir eskalasi konflik horizontal dan vertikal. Sehingga kebijakan ekonomi-politik pembangunan menemukan sintesa keberadaannya dalam ranah aktual kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan politik daerah, terutama pada daerah/kabupaten yang

mendekati perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur.

Implikasi korelasi penting dengan pembentukan daerah-daerah berdasarkan garis etnisitas di Kalimantan Barat adalah :

pertama, pemerintah pusat/provinsi bisa mengakomodir distribusi aspirasi dan kepentingan politik antar dua etnis, yaitu Dayak dan Melayu yang cenderung saling berkompetisi dalam ranah politik kelembagaan formal struktural. **Kedua**, pemerintah pusat/provinsi Kalimantan Barat bisa mengkonsesikan secara global dalam konteks otonomi daerah pada peningkatan distribusi kebijakan pembangunan ekonomi etnisitas di luar etnis Dayak dan Melayu. Di luar kedua etnis tersebut yang dimaksud adalah etnis Cina, Bugis, Jawa, Madura dan sebagainya kawasan perbatasan negara. **Ketiga**, eksekusi yang ditimbulkan dari dua implikasi ini adalah penguatan ketahanan wilayah yang terdesentralisir secara garis etnis pada mobilisasi pengolahan sumber-sumber aset ekonomi lokal yang identik terhadap *needs and wants* penduduk setempat yang meminimalisir segala dampak ilegal akibat disparitas konfrontasi kebijakan pusat dan daerah terhadap pengembangan otonomi daerah yang bersangkutan distribusi kebutuhan dan kepentingan ekonomi mereka. Dengan demikian identifikasi etnis secara dalam konteks otonomi daerah di Kalimantan Barat lebih dititik beratkan secara multilateral pada distribusi kebijakan pembangunan daerah pada entitas kebutuhan dan kepentingan etnis-etnis terhadap kedua aspek pembangunan politik pada etnis Dayak dan Melayu, berikut dengan ekonomi pada etnis-etnis di luar kedua populasi etnis mayoritas tersebut, seperti Cina, Bugis, Jawa, Madura dan sebagainya pada kawasan perbatasan negara. kebijakan konsesi ekonomi-politik ini pada akhirnya memberikan suatu landasan berpijak secara ekonomis bagi semua etnis yang bernaung di setiap kabupaten, khususnya bagi kabupaten-kabupaten yang dekat dengan

perbatasan negara. Penekanan utamanya terletak pada strategi pengelolaan yang mencakup kesejahteraan rakyat dan perekonomian wilayah perbatasan, yang didukung oleh legitimasi politik, hukum dan keamanan yang memadai.

Daftar Pustaka

- Alqadrie, Syarif Ibrahim, “*Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan sosial Dan Pemandahan Kebencian*”, <http://www.borneotribune.com>. diakses pada tanggal 10 Juni 2010,
- Baswedan, Anies, “Kata Pengantar, Dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry Van Klinken (eds.), *Politik Lokal Di Indonesia*”, KITLV&Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Borneo Tribune, “*Singkawang Siaga I, FPI-Polisi Bentrok di Tugu Naga*”,
- Harian Kompas, “*2000 WNI Jadi Warga Negara Malaysia: Terkait Infrastruktur Jalan Dan Fasilitas Umum*”, 3 Juni 2010.
- Haryanto, “Otonomi Daerah Dan Perubahan Sosial, Dalam : Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Indoflyer, “*Udara KALIMANTAN BARAT hadapi ancaman pelanggaran penerbangan gelap (asing)*”, <http://www.indoflyer.net>. diakses 10 Juni 2010.
- LBH-MABM KB, “*Inventarisir Sengketa Etnis Di Kalimantan Barat-1*”,.

- www.lbhmabmbk.blogspot.com.
Diakses 10 Juni 2010.
- Mawardi, Mohammad Ikhwanuddin, *“Membangun Daerah Yang Berkemajuan, Berkeadilan dan Berkelanjutan”*, IPB Press, Bogor, 2009.
- Tanasaldy, Taufik, “Politik Identitas Etnis Di Kalimantan Barat, Dalam : Henk Schulte Nordholt & Gerry Van Klinken (eds.), *Politik Lokal Di Indonesia*”, KITLV & Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Tribun Pontianak, “Perbatasan Rawan Jalur Narkoba”, <http://www.tribunpontianak.co.id>. diakses 10 Juni 2010.
- YP, Azis, “Sekitar 80,89 Persen Korban Trafficking Asal Kalimantan Barat”, www.teladanankali man tan.blogspot.com, diakses tanggal 9 Juni 2010.